

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMBANGUNAN OLEH
PEMERINTAHAN DESA DI DESA BERINGIN LESTARI KECAMATAN
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



SUPANDI DWI PRASETYO

NPM : 167310673

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Supandi Dwi Prasetyo
NPM : 167310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
OLEH PEMERINTAHAN DESA DI DESA BERINGIN
LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif

Pekanbaru, 04 Oktober 2021

Turut Menyetujui:
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si

Pembimbing

Drs. H. Zaini Ali.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Supandi Dwi Prasetyo
NPM : 167310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Andriyus, S.Sos, M.Si

Anggota


Dita FisdianAdni, S.IP, M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1621 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 24 November 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 November 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : SUPANDI DWI PRASETYO
NPM : 167310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAHAN DESA
DI DESA BERINGIN LESTARI KECAMATAN
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	

Pekanbaru, 25 November 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 621 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Supandi Dwi Prasetyo
N P M : 167310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAHAN DESA DI DESA BERINGIN LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR.**

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. H. Zaini Ali., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 November 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Supandi Dwi Prasetyo
NPM : 167310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Andriyus, S.Sos M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan


Indra Safri, S.Sos.,M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan penelitian yang berjudul: “PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAHAN DESA DI DESA BERINGIN LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam Penyusunan Usulan Penelitian ini, tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

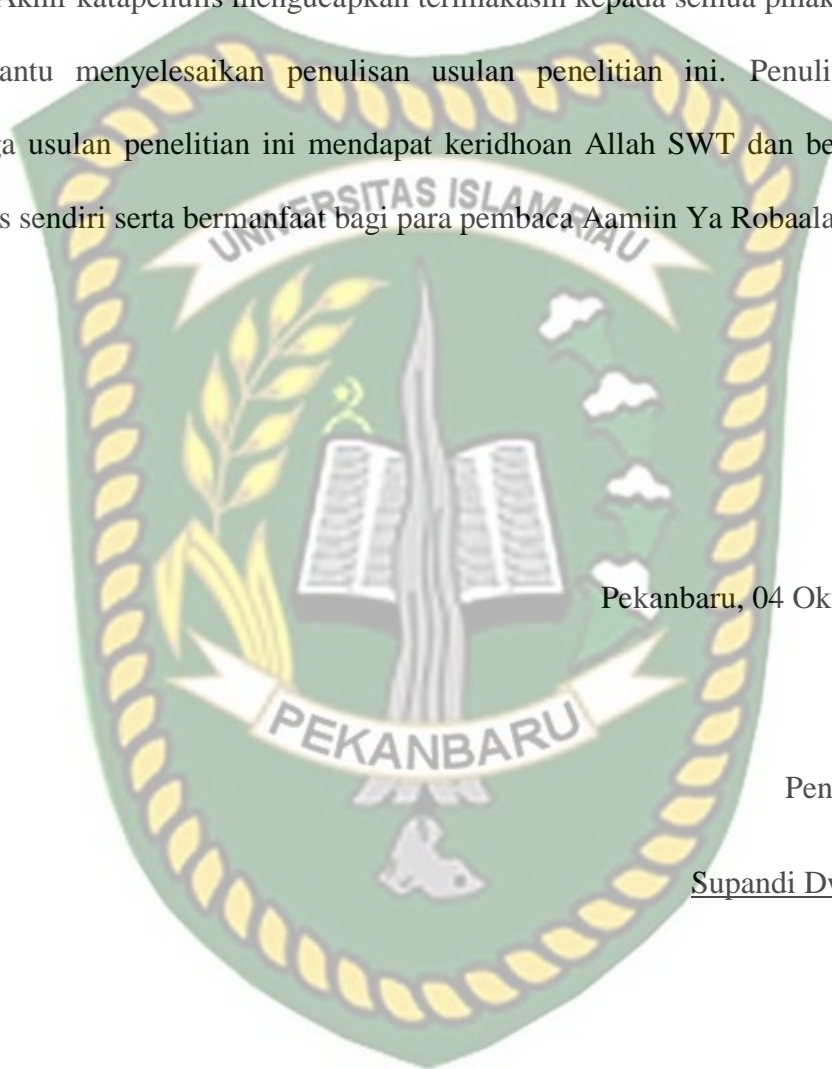
Pada kesempatan kali ini penulis ingin Menyampaikan ras terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat materil maupun non materil terkhusus penulis ingin menyampaikan kepada :

1. Terimakasih Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Terimakasih Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Terimakasih Bapak Drs. H. Zaini Ali.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis dalam penulisan penelitian ini.
5. Terimakasih Seluruh Dosen-dosen terkhusus dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mempunyai bekal dalam menyusun penelitian ini.
6. Terimakasih Kepala Tata Usaha dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
7. Terimakasih kepada ibu “Ani Andrayani” dan ayah “Bambang Santoso” tercinta serta kaka dan adik” atas kerja keras dan do’a restu yang tidak ternilai harganya, serta banyak memberikan dukungan dan melimpahkan kasih sayang tiada henti.
8. Terimakasih kepada Segenap pihak Pemerintahan Desa Beringin Lestari yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjadi objek penelitian dan telah membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman terbaik yang sudah meluangkan waktu dan dukungannya, teruntuk Riri Wulandasari, Reani Widanela, Dea Seniati, Bayudi, Yogha Utomo, Heri Hernanda, Rian Ikhsan,

Sangkur Sahing Perdana, Rahmadanil, Reza juliandri, Bayu Anggara,
dan teman-teman kelas IP H 2016.

Akhir katapenulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini mendapat keridhoan Allah SWT dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robaalamin.



Pekanbaru, 04 Oktober 2021

Penulis,

Supandi Dwi Prasetyo

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Konsep Tugas Dan Fungsi Pemerintahan.....	16

3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	17
4. Konsep Pembangunan.....	20
5. Konsep Partisipasi.....	25
6. Konsep Pemerintahan Desa.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikiran.....	31
D. Konsep Operasional.....	32
E. Operasional Variabel.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi Sampel.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
A. Sejarah Desa Beringin Lestari.....	41

B. Keadaan Penduduk.....	41
C. Keadaan Sosial.....	42
D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Beringin Lestari.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Identitas Informan	49
B. Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintah Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar	52
C. Hambatan – Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintah Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar	75
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

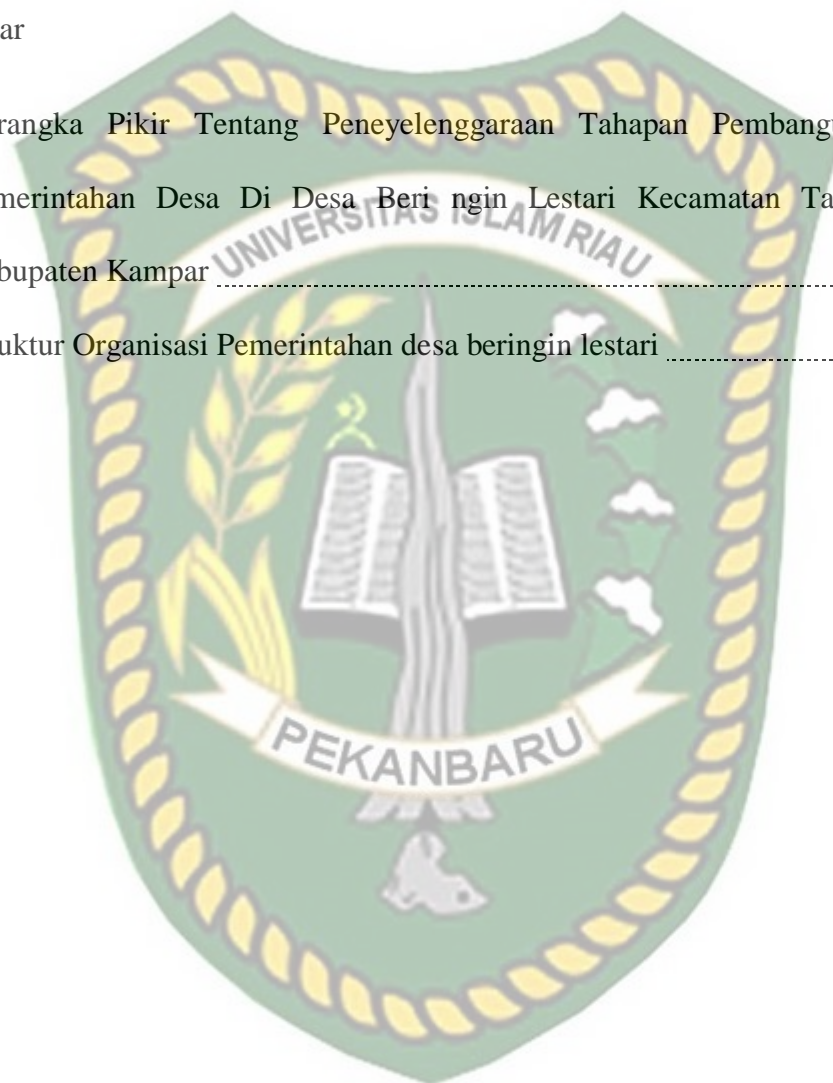
Tabel	Halaman
1.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Beringin Lestari Tahun 2018	7
1.2 Rencana Pembangunan Desa Beringin Lestari Tahun 2018	8
1.3 Pembangunan Yang Dilakukan Di Desa Beringin Lestari 2018	9
1.4 Penelitian Terdahulu	29
1.5 Operasional Variabel Penelitian Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beri Ngin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	35
1.6 Keadaan Penduduk Desa Beringin Lestari Berdasarkan Jenis Kelamin	42
1.7 Keadaan Penduduk Desa Beringin Lestari Berdasarkan Mata Pencaharian	43
1.8 Tingkat Pendidikan	44
1.9 Sarana Pendidikan Dan Peribadatan	45
1.10 Jenis Sarana Peribadatan Di Desa Beringinb Lestari	46
1.11 Aparat Pemerintahan Desa Beringin Lestari	47
1.12 Identitas Berdasarkan Usia	50
1.13 Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin	50
1.14 Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
1.15 Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Rkpdes	53
1.16 Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Indikator Penyusunan	58

1.17 Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Indikator Penetapan	64
1.18 Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Indikator Pelaksanaan	70
1.19 Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Indikator Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	31
2. Struktur Organisasi Pemerintahan desa beringin lestari	48



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supandi Dwi Prasetyo
NPM : 167310673
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar Skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri (Tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacuh pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Seminar Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 November 2021



Supandi Dwi Prasetyo

PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMBANGUNAN OLEH
PEMERINTAHAN DESA DI DESA BERINGIN LESTARI KECAMATAN
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Oleh

Supandi Dwi Prasetyo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data atau analisa data dalam penelitian ini yaitu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Sjafrizal dengan indikator, Tahapan Penyusunan Rencana, Tahapan Penetapan Rencana, Tahapan Pelaksanaan Rencana, Tahapan Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana. Berdasarkan Hasil Penelitian Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang dialami yaitu Lamanya sumber dana yang turun sehingga pembangunan sedikit terhambat dan juga ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan yang diharapkan masyarakat tetapi anggaran belum cukup dan harus menunggu sampai anggaran terpenuhi baru dilakukannya pembangunan kehadiran peserta rapat yang masi rendah sehingga musyawarah tidak banyak melibatkan masyarakat dan juga anggota BPD saat musyawarah masi terdapat yang tidak hadir.

Kata Kunci: *Penyelenggaraan, Tahapan Pembangunan Desa*

*IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT STAGES BY THE
VILLAGE GOVERNMENT IN BERINGIN LESTARI VILLAGE,
TAPUNG HILIR DISTRICT, KAMPAR REGENCY*

Abstract

By

Supandi Dwi Prasetyo

This study aims to determine the implementation of the development stages carried out by the Village Government in Beringin Lestari Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. In this study the author uses a qualitative method. The data collection technique of this research is observation, interviews and documentation. Technical data processing or data analysis in this study is the presentation of data, and drawing conclusions. This research uses Sjafrizal's theory with indicators, Stages of Planning, Stages of Determination of Plans, Stages of Plan Implementation, Stages of Evaluation of the Success of Plan Implementation, Based on Research Results of Implementation of Development Stages by Village Governments in Beringin Lestari Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency carried out optimally. As for the obstacles experienced, namely the length of the source of funds that fell so that development was slightly hampered and also when the government wanted to carry out the development expected by the community but the budget was not sufficient and had to wait until the budget was met, then the attendance of meeting participants was still low so that the deliberation did not involve much. the community and also members of the BPD during the deliberation there were still those who were not present.

Keywords: *Implementation, of Village Development Stages*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 antara lain adalah melindungi segenap bangsa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia melakukan Pembangunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik berdasarkan undang-undang 1945. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbagi atas daerah provinsi dan daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Daerah daerah tersebut menjadi kesatuan dalam wilayah NKRI oleh karena itu, pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk

menciptakan alternative yang lebih tinggi secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya.

Selanjutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahh, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundnag-undangan. Dan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (12) desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 mengatakan pemerintahan desa dengan dipimpin oleh seorang kepala desa bertugas menyelnggaran pemerintahan Desa,melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. berdasarkan undang-undang tersebut jelas diam anatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang desa pada pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,melaksanakan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa,dan

pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Menge,mbangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah kewenangan desa yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan istiadat desa.

Pembangunan pedesaan adalah bagian dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan diwilayah setempat .pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat

penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh Negara. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat yang berbeda di daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalam membangun lingkungan di daerahnya masing-masing. Pada intinya, pembangunan merupakan salah satu bagian dari program pemberdayaan masyarakat di daerah .

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat semua aparatur pemerintahan desa baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan badan perwakilan desa atau BPD harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional dan akuntabel.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang sering kali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut termasuk tentang pelayanan umum pada masyarakat. Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

dipusat, didaerah, didesa, dan dilingkungan BUMN atau daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka penyelenggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparat birokrasi desa dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa meliputi masalah internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi aparat pemerintahan desa, keterlaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat.

Dalam melakukan Penyelenggaraan Pembangunan terdapat empat tahapan dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan. yaitu yang pertama tahapan penyusunan rencana, yang kedua tahapan penetapan rencana, yang ketiga tahapan pengendalian rencana, dan tahapan evaluasi keberhasilan dan pelaksanaan rencana, dalam tahapan pembangunan juga terdapat Musrembang yaitu sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan harus dilakukannya musyawarah bersama masyarakat, mulai dari penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sampai dilakukannya pembangunan, sehingga pembangunan yang di Desa benar – benar menjadi suatu kebutuhan masyarakat.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjuti agar apa yang menjadi tujuan pemerintahan biar tercapai sesuai

yang diharapkan. Tidak hanya kepala desa tetapi perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah desa. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan Desa mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik. Masyarakat juga harus ikut adil dalam mengawasi kinerja perangkat-perangkat desa dimana kepala desa harus menjalankan kewajibannya sebagai pimpinan yang baik, sebagai contoh dan panutan yang baik bagi masyarakatnya agar kedepannya kemajuan dan kesejahteraan Desa dapat tercapai.

Desa Beringin Lestari merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 1.680 Haktar kemudian dengan jumlah Penduduk 3.025 dan jumlah kepala keluarga berjumlah 801. Desa Beringin Lestari merupakan Desa Swakarya karena desa ini sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak menjadi desa yang terisolir. dan dilihat dari Indeks Desa Membangun Desa Beringin Lestari sedang bersatus desa sedang Berkembang dengan nilai rata-ratanya jika desa Berkembang yaitu $>0,599$ dan $\leq 0,815$. Desa Beringin Lestari memiliki sumber daya yang memadai dan sedang berusaha membangun Desa, agar menjadi desa yang maju dan berkembang, Pembangunan desa juga di tujukan pada Desa beringin Lestari. Pembangunan desa di fokuskan pada pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan

Alokasi Dana Desa (ADD). Semua kegiatan pembangunan Desa Beringin Lestari terlebih dahulu dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di Desa Beringin Lestari. Agar tujuan pembangunan di Desa Beringin Lestari benar-benar dapat di wujudkan, maka arah kebijakan Pembangunan di Desa Beringin Lestari hendaklah berorientasi kepada Azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna, bukan hanya sekedar keinginan Segelintir Elit Desa, namun merupakan kebutuhan bersama Seluruh Masyarakat Desa Beringin Lestari. Adapun data Rencana Kerja Pemerintah Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2018.

Tabel I.1: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Beringin Lestari Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya /Rp	Perkiraan Sumber Dana
1	Pembuatan Saluran Drenase	Dusun I, II,&III	2.000 Meter	600.000.000	APBDes
2	Pembangunan Box Culvert	Dusun I,&II	5 unit	78.182.000	APBDes
3	Pembangunan Pos Kamling	Dusun I, II,&III	4 unit	165.000.000	APBDes
4	Pembangunan Lapangan	Dusun I	1 unit	6.000.000	APBDes

	Bola Voli				
5	Pembangunan Lapangan Bola Takraw	Dusun I	1 unit	7.500.000	APBDes
6	Pembangunan Semenisasi Gang	Dusun I,&II	800 meter	268.000.000	APBDes
7	Pengadaan Baving Block Kantor BPD	Dusun I	15 x 20	20.000.000	APBDes
8	Pengadaan Gorong-gorong	Dusun I,&II	32 unit	56.160.000	APBDes
9	Pengadaan Baving Block Kantor Desa	Dusun I	15x 20	20.000.000	APBDes
10	Pembangunan Gedeng Baru Kantor Desa	Dusun I	1 unit	257.000.000	APBDes
11	Pengadaan Baving Block Gedung serba guna	Dusun I	15 x 20	20.000.000	APBDes

Sumber : Kantor Desa Beringin Lestari 2018

Pengalokasian anggaran pembangunan daerah dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa). Adapun data Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel I.2: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Beringin Lestari Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran (RP)
1.	Dana Desa	767.104.000
2.	A lokasi Dana Desa	533.057.000
3.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000
4.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	31.735.000

5.	Pendapatan Asli Desa	15.709.000
Jumlah Pendapatan		1.447.605.000

Sumber : Kantor Desa Beringin Lestari 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa pendapatan Desa sangat memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Beringin Lestari sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari -sehari. Adapun data Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Beringin Lestari dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.3: Pembangunan yang dilakukan Di Desa Beringin Lestari tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Jumlah biaya	Sumber Dana
1.	Pembangunan Drainase RT.01	45.168.000	DD
2.	Pembangunan Drainase RT.04	68.415.000	DD
3.	Pembangunan Drainase RT.05	131.916.000	DD
4.	Pembangunan Drainase RT.06	142.989.000	DD
5.	Pembangunan Drainase RT.07	54.064.00	DD
6.	Pembangunan Drainase RT.10	35.115.000	DD
7.	Pembangunan Semenisasi Gang	123.670.000	DD
8.	Pengadaan Pos Kamling	15.570.000	DD
9.	Pembangunan Lapangan Bola Voli	16.856.000	DD
10.	Pembangunan Lapangan Bola Takraw	14.670.000	DD
11.	Pembangunan Box Culvert	11.195.000	DD
Jumlah		659.628.000	

Sumber : Sumber : Kantor Desa Beringin Lestari 2018

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui jenis pembangunan di Desa Beringin Lestari kecamatan tapung hilir kabupaten Kampar terdapat enam jenis pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari, pembangunan drenase RT.01, pembangunan drenase RT.04, pembangunan drenase RT.05, pembangunan drenase RT.06, pembangunan drenase RT.07, pembangunan drenase RT.10, pembangunan semenisasi gang, pengadaan pos kamling, pembangunan lapangan bola voli, pembangunan lapangan bola takraw dan , pembangunan box culvert.

Hasil evaluasi dari Pemerintahan Desa Beringin Lestari terhadap bidang pelaksanaan pembangunan Desa secara keseluruhan ada 11 kegiatan pembangunan tesaerabut terlaksana namun masih terdapat kekurangan pada pembangunan tersebut yaitu seperti dua jenis kegiatan pembangunan yaitu pembangunan drenase dan pembangunan semenisasi gang yang belum terlaksana sampai selesai karena kekurangan biaya dan akan diprioritaskan pada rencana pembangunan desa tahun mendatang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunan didesa beringin lestari masih tergolong lemah dalam proses perencanaan pembangunan yang disusun dalam RKP-Des dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan yang seharusnya jenis pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Des). Kemudian dalam pelaksanaan fisik di Desa juga masih belum baik, beberapa pembangunan fisik di Desa Beringin Lestari sendiri sudah banyak yang rusak dan tidak dirawat dengan dana pemeliharaan pembangunan.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu

menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita dalam pembangunan, maka kepala desa dan pemegang peranan yang menentukan dan sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemeritahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait mengait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Berdasarkan hal-hal di atas, sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan penelitian ini mengenai Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Berikut :

1. Berdasarkan Pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Desa Beringin Lestari terlihat ada indikasi dan juga ada ketidak sesuaian antara rencana dan hasil pembangunan, hal ini terlihat dari 11 jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan terdapat 2 jenis kegiatan yang dibangun belum dilaksanakan sampai selesai yaitu pembangunan Semenisasi gang, pembangunan Drainase RT 05 dan pembangunan Drainase RT 07.
2. Terlihat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Beringin Lestari tidak mengacu pada perencanaan yang sudah di buat, hal ini terlihat karena tidak sesuainya data dari RKP-Des dengan pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Penyelenggaraan**

Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar". Penelitian ini penulis batasi hanya melihat Penyelenggaraan Tahapan pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : **“Bagaimanakah Tahapan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Tahapan-tahapan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Beringin Lestari.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoristis

Yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya wawasan penulis mengenai Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan atau bahan informasi tentang hasil Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

c. Kgeunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai reverensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam Penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan peneliti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapaun teori-teori yang digunakan harus merupakan konsep yang berhubungan dengan permasalahan penelitian mengenai “Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar” Berikut merupakan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Secara teoritik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Menurut Ridwan (2014;30-31) pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaa tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau yang menjalankan pemerintahan. Pemerintahan sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sence*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Pemerintahan dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan

yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang berindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan seni karena beberapa banyak pimpinan pemerintahan yang tanpa pendidikan mampu berniat serta berkarismatik menjalankan roda pemerintahan sedangkan dikatakan ilmu pemerintahan adalah karena memenuhi syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek baik objek material maupun performa universal dan sifatnya sistematis.

Awang dan Wijaya (2012:8) Pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintahan dalam hubungan ini berfungsi memproduksi pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat. Pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan tersebut tunduk bawah hukum alam. Yaitu kelangkaan, sehingga terbentuknya kesenjangan yang tajam penawaran (pemenuhan

kebutuhan) dengan permintaan (kebutuhan). Satu-satunya cara untuk mengurangi kesenjangan itu sampai mendekati nol adalah pengembangan atau peningkatan setinggi mungkin nilai setiap sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan) penghasil alat pemenuhan kebutuhan.

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafie, 2014;9) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Syafie (2014;12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan Pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan,

pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur satu komponen dari suatu jabatan. Selanjutnya tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap Moekidjat (1998:11).

Sedangkan menurut Thoha (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan diwajibkan di kerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah di buat berdasarkan tujuan, visi, misi, suatu organisasi.

Thoha (2011:76) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Rasyid dalam labolo (2008:22) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation).

Menurut Ndraha (2005:25) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua yaitu fungsi pemberdayaan, dan ketiga yaitu fungsi pelayanan.

Ndaraha (2001:5) mengemukakan pemerintahan adalah sistem multiproses yang bertujuan dan melindungi kehidupan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan sipil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan posisi yang dipegangnya.

Sedaryamayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah

- a. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan social.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Siswanto (2005:9) Manajemen sebagai suatu ilmu adalah komunikasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, keampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005:2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Siswanto (2005;3) Elemen fungsi dari dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian/pengawasan.

- a. Perencanaan
yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/langkah langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas dalam selanjutnya. Tujuan yang ingin direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, dipedomani, dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi, khususnya manajer yang memegang kemudi organisasi.
- b. Pengorganisasian
yaitu suatu proses dan rangkaian dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif. Dengan demikian, kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi setiap aktivitas yang dilaksanakan. Jadi, pengorganisasian berarti menetapkan system organisasi yang dianut organisasi dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah perealisasi tujuan.
- c. Pengarahan
yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, manajer haruslah memberi memberikan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negative dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.
- d. Pemotivasian
yaitu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya, agar terciptanya keadaan kerja yang menggairahkan, manajer harus melaksanakan fungsinya, memotivasi bawahannya.

Dengan demikian individu tersebut didorong berperilaku dan bertindak mencapai tujuannya.

- e. Pengendalian/pengawasan, yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk membimbing bawahan agar bawahan pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau dengan kata lain untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan kearah rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Stoner manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli, 2005;28).

Kemudian menurut Darwis dkk (2009;5) yang mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Manajemen tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional seperti yang telah dikemukakan Siagian (2003;5) Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Menurut Tery (dalam Siswanto 2005;10) secara esensial seorang menejer adalah seorang ilmuwan dan seniman, ia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat disusun menurut system yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaanya.

Menurut Handoko (2009:6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen :

- a. Untuk mencapai tujuan manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang harus berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

4. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah perencanaan dan pengintegrasian masyarakat. Perencanaan itu sendiri merupakan proses untuk menentukan, menemukan, dan menjelaskan arti suatu masalah, meningkatkan hakekat ruang lingkup masalah, mempertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangannya, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya dipilih.

Menurut Siagian (2018:4), Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari suatu yang bersifat tanpa akhir (Never Ending).

Sedangkan Menurut Marbun (2007:39), Pembangunan adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit terendah yang harus

dilaksanakan terus-menerus, secara sistematis dan terarah sebagai suatu kesatuan dengan pembangunan regional dan nasional.

Menurut Paul H. Landis dalam Darsono (2005:20) memberi batasan-batasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan statistik, Pedesaan adalah daerah yang mempunyai penduduk lebih dari 2500 orang.
2. Berdasarkan psikologi sosial, Pedesaan adalah daerah dimana pergaulan ditandai dengan keakraban dan keramah-tamahan.
3. Berdasarkan ekonomi, Pedesaan adalah daerah yang pokok kehidupan masyarakatnya berasal dari pertanian.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005:71) pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Sjafrizal (2017:24) Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih tepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Kemudian menurut sjafrizal secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan penyelenggaraan pembangunan.

1. Tahap penyusunan rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi. Namun demikian, bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan oleh badan perencana sendiri dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait. Hal ini sangat penting artinya agar perencanaan tersebut lebih bersifat operasional dengan menjaga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya.

Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat dimulai menyusun naskah awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam MUSRENBANG untuk menerima

tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan para tokoh lembaga social masyarakat (LSM) setempat. Naskah rencana akhir akan dapat disusun oleh perencana setelah memasukkan semua kritikan dan usul perbaikan yang diperoleh dari MUSRENBANG tersebut.

2. Tahap penetapan rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD untuk mendapat pengesahan dari kepala daerah . pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penetapan rencana oleh kepala daerah pada umumnya berjalan lancar bilamana BAPPEDA telah melakukan finalisasi setelah memasukkan hasil MUSRENBANG. Akan tetapi, penetapan rencana melalui DPRD sering kali memerlukan proses yang juga cukup memakan waktu karena diperlukan pembahasan kembali oleh pihak dewan. bahkan adakalanya dewan melakukan kembali pembahasan dengan para tokoh masyarakat untuk mendapatkan penilaian terhadap rancangan rencana yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

3. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif

melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan lancar sesuai dengan rencana baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

4. Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu pula dievaluasi, bila mana kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil (*outcome*) sesuai dengan yang direncanakan semula. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas tiga unsur evaluasi yaitu : unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sedangkan kriteria evaluasi secara lengkap mencakup enam unsur dengan tambahan menyangkut dengan evaluasi proses, manfaat (*benefit*)

dan dampak (impact). Di samping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (feedback) untuk penyusunan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

5. Konsep Partisipasi

Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara aktif. Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan.

Menurut Sumaryadi (2010:46) Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, eaktu, keahlian, modal, atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk

menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Conyer dalam Soetomo (2006:312), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu :

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin bawesar kepada masyarakat untuk berpartisipasi
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal dan
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (Community development).

Mikkelsen dalam Soetomo (2006:348), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau program-program pembangunan
3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu

4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijadikan satu pengertian bahwa keikutsertaan dan keterlibatan menjadi subyek perilaku yang beraktivitas adalah seseorang atau sekelompok interaksi dan komunikasi yang timbul dari keterlibatan mental dan emosi terhadap suatu kondisi untuk mencapai suatu tujuan yang memerlukan kerjasama dan tanggung jawab.

6. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah bisa berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya

Menurut Awang (2010:49) pemerintah secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi berbagai kehidupan mereka.

Menurut Widodo (2002:65) pemerintah lokal merupakan pemerintah yang didekatkan dengan rakyat. Dengan demikian akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat akan mencerminkan apa yang menjadikepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayanani nya.

Menurut (Haw. Widjaja,2003;65) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Nurcholis (20011;2) desa adalah suatu wilayah ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Selanjutnya Nurcholis (20011;73) Menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintahan Desa dan BPD pemerintah desa adalah organisasi yang terdiri atas :unsur pimpinan Kepala Desa, unsur pembantu

Kepala Desa yang terdiri atas :Sekretaris Desa,unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan dari ketiga unsur tersebut memiliki unsur masing-masing.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

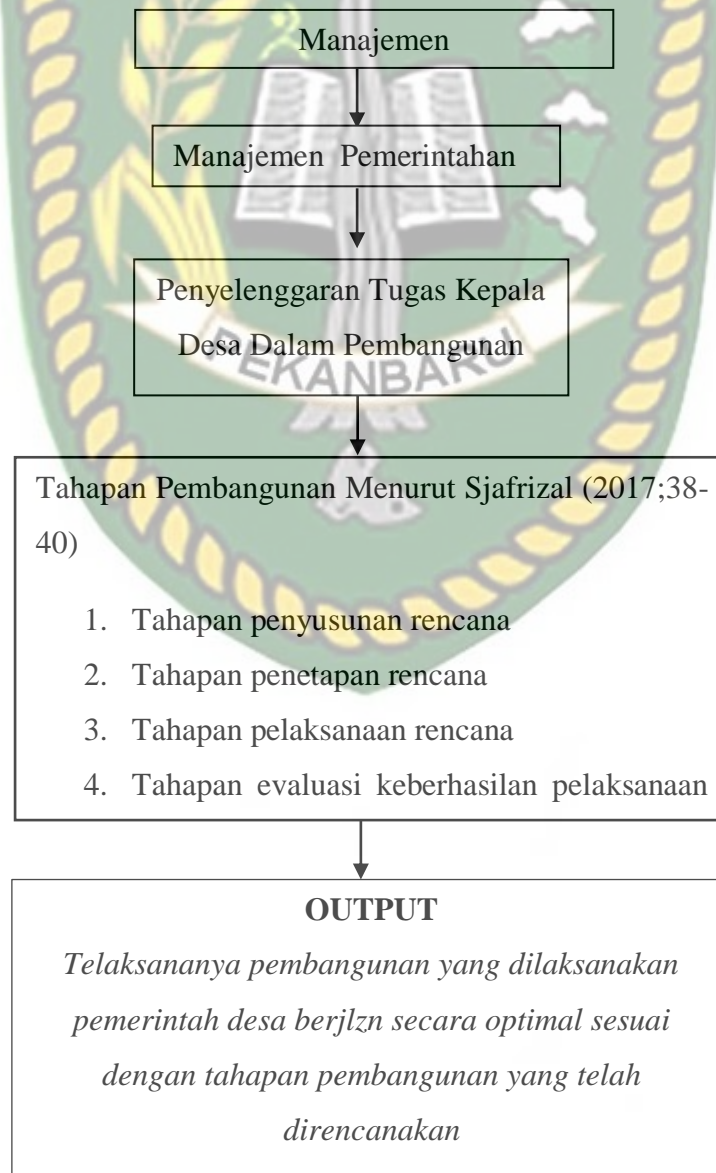
Nama	Judul Penelitian	Konsep	Indikator	Lokasi
Arbaiyah	Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	peran adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan, peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun pengguna dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. (Soekanto, 2003;243)	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pemantauan d. Pengawasan Pembangunan	Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Yopi	Peran Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipasi Di Desa Kelangan Kecamatan Benguran Timur Laut Kabupaten	Peranan adalah suatu bagian perilaku yang diharapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jejang pemerintahan (Ndraha, 2003;53)	1. Rapat Rutin 2. Pertemuan-pertemuan berkala untuk pejabat-pejabat tertentu 3. Membentuk panitia gabungan 4. Wawancara	Di kantor desa kelangan kecamatan banguran timur laut.

			dengan bawahan / pihak yang terlibat. (Westa, 1985;55- 56)	
Wiwitri	Penyelenggaraan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa mak teduh kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan	Penyelenggaraan pembangunan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan desa kebutuhan,kwenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri.(Awang, 2010;53)	1. Perencanaan pembangunan 2. Pengerahan partisipasi 3. Pelaksanaan pembangunan	Di desa mak teduh kecamatan kabupaten pelalawan

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan teori yang telah dijelaskan. Kemudian di ukur dengan teori yang telah diindikator, maka penulis menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam analisis kinerja alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar. II.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar



D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah bisa berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya
3. Desa adalah Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

4. Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang mengepalai sebuah wilayah dan memimpin menyelenggarakan urusan pemerintahan ditingkat desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
5. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.
6. Menyelenggarakan urusan pembangunan desa adalah usaha dalam melaksanakan tugas-tugas pokok demi tercapainya satu tujuan bersama, dimana penyelenggaraan suatu tugas di nilai dari baik atau tidaknya tergantung apabila tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.
7. Manajemen adalah merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Antara ilmu administrasi, organisasi dan manajemen ini saling berhubungan satu sama lain, jika organisasi adalah sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan administrasi atau ilmu administrasi, dimana aktivitas administrasi itu merupakan kerja sama antar beberapa orang, maka ilmu manajemen merupakan suatu seni dan ilmu dalam mengatur hubungan kerja sama antara beberapa orang tersebut di dalam sebuah organisasi

8. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kondisi yang lebih baik dilakukan secara sadar oleh pemerintah dan masyarakat agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai di semua bidang.
9. Penyusunan rencana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Beringin Lestari dalam menyusun rencana pembangunan, pertimbangan dari aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan dan hal yang terkait dalam rencana pembangunan.
10. Penetapan rencana adalah hak dan kewenangan Pemerintahan Desa Beringin Lestari dalam menetapkan rencana pembangunan sesuai dengan pertimbangan dan susunan tentang pembangunan yang telah disaring oleh Pemerintah Desa Beringin Lestari.
11. Pelaksanaan rencana adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Beringin Lestari saat pembangunan sedang berlangsung, dilakukan untuk mengontrol agar pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
12. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana adalah hal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Beringin Lestari setelah pembangunan selesai, melakukan perbandingan antaran rencana dengan hasil.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Penyelenggaraan adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahannya untuk dapat di menerti dan pembagian pekerjaan yang Efekti dan Efisien untuk tujuan yang nyata. sedangkan Penyelenggaan Pembangunan merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis</p>	<p>Penyelenggaraan Pembangunan Desa Beringin Lestari</p>	<p>1. Tahapan penyusun rencana pembangunan</p>	<p>a. Pembentukan tim b. Penjaringan aspirasi c. Penyusunan naskah d. Musrebang desa</p>

<p> untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan. Menyangkut variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. (Sjafrizal 2017) </p>			
		<p>2. Penetapan rencana pembangunan</p>	<p> a. Rapat bersama BPD b. Masukan dari peserta rapat c. Pengambilan kepuusan d. Penetapan rencana pembangunan </p>
		<p>3. Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan</p>	<p> a. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan b. Pembangunan sesuai </p>

			rencana c. Observasi lapangan d. Menanggulangi permasalahan
		4. Tahapan Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan	a. Masukan (Input) b. Keluaran(Output) c. Hasil(Outcome) d. Manfaat(Benefit) e. Dampak(Impact) f. Upan Balik(Feedback)

Sumber : Modifikasi penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis data melalui teknik kualitatif. metode penelitian kualitatif sebagaimana di kemukakan oleh Sugiyono (2018:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menyampaikan data. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengetahui pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah berjalan efektif atau tidak. Karena pada kenyataannya masi banyak ditemukan pembangunan yang belum telaksana.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan tahapan pembangunan di Desa Beringin Lestari.

a. Key Informan

Key Informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi utama yang penulis butuhkan. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

b. Informan

Informan orang yang terlibat dalam suatu pokok pembahasan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RT dan Masyarakat.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang penyelenggaraan pembangunan di Desa Beringin Lestari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang sudah tersedia di Kantor Kepala Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data informasi yang lengkap diperlukan oleh penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan dan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini, pengambilan data dilakukan dengan

1. Observasi

Yaitu untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian serta dapat mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di Kantor Desa

2. Wawancara

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil penelitiannya.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan ahli dokumen yang berhubungan dengan

masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan seperti monografi Desa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiyono,2010:169) .

Setelah data-data yang didapat melalui wawancara, Dokumentasi dan studi kepustakaan oleh penulis mengenai Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Desa Tahun 2018, kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan teori dan konsep yang ada. Selanjutnya hasil penelitian lapangan akan dihubungkan dengan permasalahan yang di angkat guna mendapatkan suatu kesimpulan.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Penelitian Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Pekan ke																													
		II				III				IV				V				VI				VII									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Penyusunan UP																														
2	Seminar UP																														
3	Revisi UP																														
4	Transkrip Wawancara																														
5	Turun Lapangan																														
6	Reduksi Data																														
7	Triangulasi Data																														
8	Penarikan Kesimpulan																														
9	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																														
10	Konsultasi Revisi Skripsi																														
11	Ujian Komferehensi Skripsi																														
12	Revisi Skripsi																														
	Penggandaan Skripsi																														

Sumber : Olahan Penulis 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Beringin Lestari

Desa Beringin Lestari adalah suatu desa yang berada di kecamatan tapung hilir dan berada di kabupaten kampar, Desa Beringin Lestari berada di perbatasan antara kabupten kampar dengan kabupaten siak oleh sehingga desa ini sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah kabupaten kampar, sumberdaya yang ada di di Desa Beringin Lestari.

Batas Wilayah Desa Beringin Lestari

1. Sebelah utara : Desa Sam-Sam
2. Sebelah Selatan: Desa Tapung Makmur
3. Sebelah Timur : Desa Cinta Damai
4. Sebelah Barat : Desa Tandan Sari

B. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar dan faktor utama dalam pembangunan karena penduduk merupakan objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri sehingga keadaan penduduk penting diketahui seperti halnya di Desa Bringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data yang di peroleh dari lokasi penelitian adapun jumlah penduduk di Desa Bringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah 3025 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1560 jiwa dan perempuan 1465 jiwa,

dengan 801 Kepala Keluarga (KK). Dari data tersebut di atas jika di pisahkan berdasarkan kelompok umur maka menjadi suatu keragaman. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Bringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 : Keadaan Penduduk Desa Bringin Lestari Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.560
2.	Perempuan	1.465
Jumlah		3.025

Sumber: Kantor Desa Bringin Lestari 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis kelamin penduduk Desa Bringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah 1560 Jiwa laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan Desa Bringin Lestari sebanyak 1465 Jiwa. Jadi dari tabel diatas di ambil kesimpulan bahwa untuk total keseluruhan penduduk Desa Bringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berjumlah 3025 Jiwa.

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Bringin Lestari berikut akan di paparkan mengenai mata pencarian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

1. Mata pencarian

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk jika di kelompokkan menurut pekerjaan / mata pencarian dapat di pisahkan menurut jenisnya masing masing sebagai mana tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 : Keadaan Penduduk Desa Beringin Lestari Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Jeni Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	291 Jiwa
2.	Buruh	7 Jiwa
3.	Pegawai Negri Sipil	14 Jiwa
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	20 Jiwa
5.	Pedagang	13 Jiwa
6.	Peternak	22 Jiwa
7.	Dokter	3 Jiwa
8.	Bidan	5 Jiwa
9.	Pensiunan TNI/Polri	1 Jiwa
10.	Wiraswasta	381 Jiwa
11.	Karyawan Swasta	202 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Beringin Lestari 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Bringin Lestari adalah wiraswasta. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Desa Bringin Lestari menunjukkan sejahtera karena didominasi oleh wiraswasta sebanyak 360 Jiwa.

2. Tingkat Pendidikan

Dari pemerataan pembangunan pendidikan dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi perkembangan informasi yang kian

meningkat, masyarakat Desa Bringin Lestari memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu di bawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Bringin Lestari yang di tuangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bringin Lestari

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	117
2.	SD	789
3.	SMP/MTS	575
4.	SMA	541
5.	D-1	12
6.	D-3	22
7.	S-1	48
8.	S-2	5

Sumber: Kantor Desa Bringin Lestari 2021

Dari tabel di atas di jelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Bringin Lestari mayoritas tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 789 jiwa dan minoritas tingkat perguruan tinggi yaitu sebanyak 87 jiwa.

3. Sarana Pendidikan dan Peribadatan

Setelah di paparkan tentang jumlah penduduk yang di lihat dari tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan tersebut selayaknya data tentang sarana dan prasarana berupa gedung sekolah sangatlah mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu dibawah ini jenis sarana pendidikan di Desa Bringin Lestari sebagai Berikut :

Tabel IV.4 : Jenis Sarana Pendidikan di Desa Beringin Lestari

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1.	Paud	1 Unit	Dusun 1
2.	TK	1 Unit	Dusun 1
3.	SD	1 Unit	Dusun 1
4.	MDTA	1 Unit	Dusun 1
5.	MTS/SMP	1 Unit	Dusun 1
6.	SMA	-	-

Sumber: Kantor Desa Beringin Lestari 2021

Apabila dilihat dari data sarana dan prasarana pendidikan diatas, maka untuk sarana pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa belum memadai, yaitu mulai dari PAUD sampai SLTP sudah ada dan kalau ingin melanjutkan ke pendidikan SMA maka penduduk Desa Beringin Lestari Harus menempuh perjalanan ke kecamatan kurang lebih 1 jam.

Tabel IV.5 : Jenis Sarana peribadatan di Desa Beringin Lestari

No.	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushola	3
3.	Gereja	-
Jumlah		9

Sumber: Kantor Desa Beringin Lestari 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Beringin Lestari mayoritas masyarakat beragama islam sehingga banyak di bangun sarana peribadatan untuk masyarakat yang beragama islam.

D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Beringin Lestari

Wilayah Pemerintahan Desa Beringin Lestari terbagi dalam 3 dusun, 7 RW, 18 RT. Unsur Pemerintahan Desa Beringin Lestari sebgaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari : Aparat Pemerintahan Desa dan BPD.

Kepala Desa Beringin Lestari di pilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Aparat Desa dari Unsur: Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebagai sebagai unsur kewilayahan.

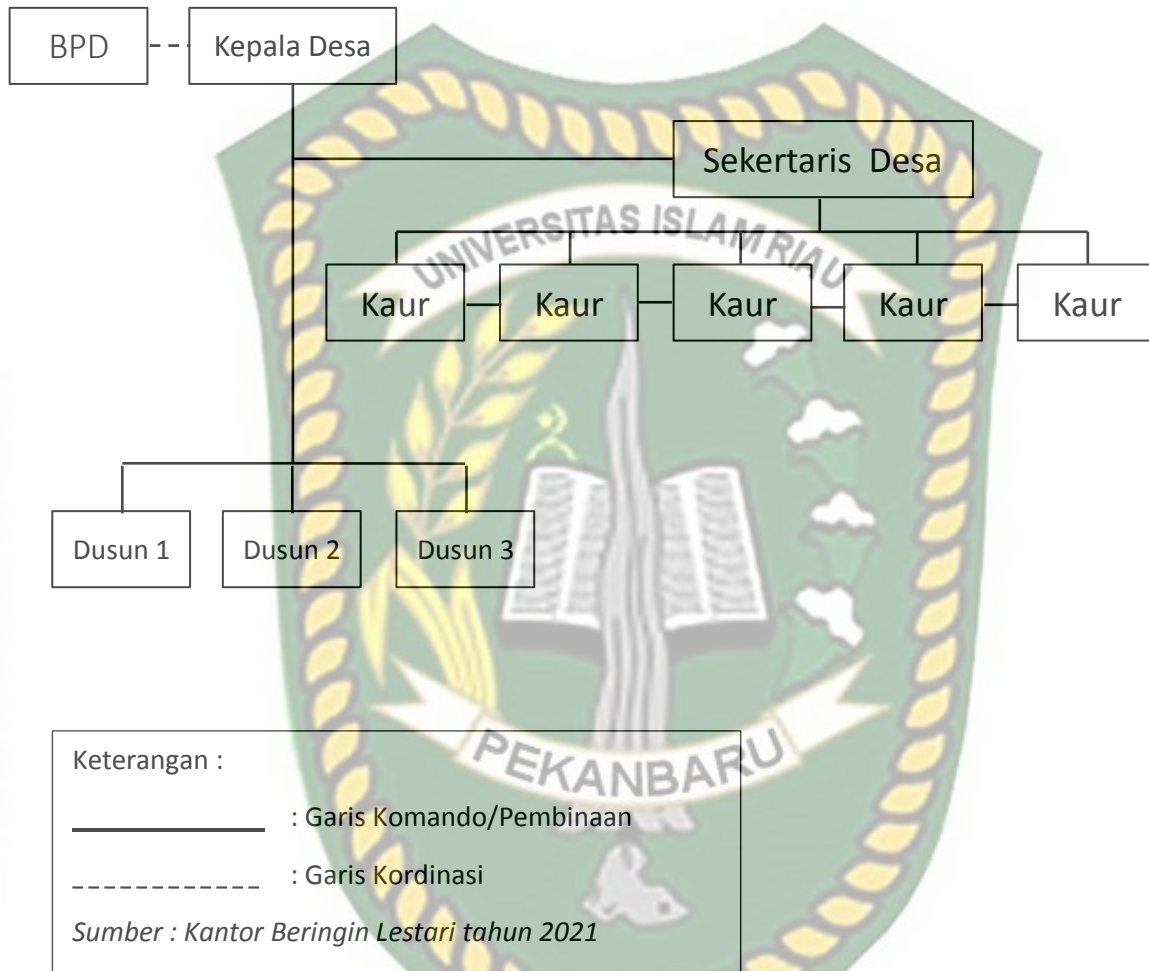
Tabel IV.6 : Aparat Pemerintahan Desa Beringin Lestari

No.	Nama	Jabatan
1.	Dedeng suparman	Kepala Desa
2.	Rahmawati Cahyono	Sekdes
3.	Riska pujiawan	Kaur Pemerintahan
4.	Ariawan	Kaur Pembangunan
5.	Apen	Kaur Kesejahteraan Rakyat
6.	Asep syaprudin	Kaur Umum
7.	Sugeng Triaman	Kaur Keuangan
8.	Yusuf suprianto	Dusun 1
9.	Agus Sali	Dusun 2
10.	Wahyudi	Dusun 3

Sumber: Kantor Desa Beringin Lestari 2021

Dengan dibantu oleh perangkat Desa tersebut, Kepala desa menjalankan tugas-tugasnya yaitu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BERINGIN
LESTARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR.**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan

Dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dijelaskan mengenai identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini Penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia informan.

1. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Keadaan usia Informan sangat harus diperhatikan, untuk mengetahui kemampuan Informan dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap, Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar maka pada tabel berikut akan di paparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu :

Tabel V.1: Identitas Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	21-30	0 Orang
2	31-40	2 Orang
3	41-50	6 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber : *Data olahan Peneliti 2021*

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan umr adalah 8 orang yang dijadikan sebagai informen sebanyak 2 orang Berumur 31-40 tahun,sebanyak 6 orang berumur 41-50 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas informen yang mendominasi berdasarkan umur 41-50 tahun.

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas Informan ini juga akan menjelaskan jenis kelamin Informan. Hal ini sesungguhnya ti dak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapn data Informan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah Informan berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut :

Tabel V.2: Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	6 Orang
2	Wanita	2 Orang
JUMLAH		8 Orang

Sumber : *Data Olahan Peneliti 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan jenis kelamin adalah 6 orang yang dijadikan informen ,sebanyak 6 orang pria dan 2 orang berjens kelamin wanita .Maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan jenis kelamin yang mendominasi pria.

3. Identitas Informan Brdasarkan Ti ngkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menunjukkan tingkat pengetahuan dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang,biasanya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka pola pikirnya juga semangkin matang,maka dewasa dalam meyikapi permasalahan juga pengetahuan yang dimiliki juga semangkin tinggi.

Tabel V.3: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA/Sederajat	7
2	Sarjana (S1)	1
Jumlah		8

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita ketahui identitas informan berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu SMA sebanyak 7 orang dan Sarjana (S1) sebanyak 1 orang. Maka dapat kita simpulkan Identitas Innforman Tingkat Pendidikan SMA lebih dominan.

B. Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Penyelenggaraan Pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan diwilayah setempat.

Untuk menyelenggarakan tahapan Pembangunan Pemerintahan Desa juga harus Berorientasi pada program Pemerintah dan Aspirasi Masyarakat. Sesuai dengan apa yang diinginkan dan di butuhkan oleh masyarakat Desa Beringin Lestari, Baik itu Pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.

Adapun Indikator-Indikator dalam penyelenggaraan tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan
2. Tahapan Penetapan Rencana Pembangunan
3. Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Tahapan Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam Penelitian ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap indikator yang telah dilampirkan di atas dan akan di pertanyakan oleh setiap informan agar data yang di hasilkan dapat secara mudah di pahami.

1. Indikator Tahapan Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat dimulai menyusun naskah awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam MUSRENBANG untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan para tokoh lembaga sosial masyarakat (LSM) setempat.

Tabel V.4: Tim Penyusunan Rencana Pembangunan RKPDes

No	Nama	Jabatan Dalam Tim Penyusunan
1	Abdul Jalil	Pembina
2	Rahmawati	Ketua
3	Ahmad Junaidi	Anggota
4	Edi Suprayitno	Anggota
5	Nurul Amanatul H	Anggota
6	Suratno	Anggota
7	Suriana	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Lestari Tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan RKPDes.

Dari tabel di atas diketahui dalam pembentukam tim penyusunan rencana pembangunan ini yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Des) yang telah di tetapkan sebanyak 7 orang diantaranya Abdul Jalil Sebagai Pembina, Rahmawati Sebagai Ketua dan Ahmad Junaidi, Edi Suprayitno, Nurul Amanatul H, Suratno, Suriana sebagai anggota.

a. Pembentukan Tim Dalam Menyusun Rencana Pembangunan

Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 jam 09.00 tentang bagaimana pembentukan tim dalam menyusun rencana pembangunan dengan Bapak Dedeng Suparrman Kepala Desa Beringin Lestari sebagai key Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“jelas, pemerintahan desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan lembaga Desa yaitu RT, RW dan beberapa tokoh Masyarakat untuk membentuk tim pelaksanaan dalm perencanaan pembangunan dan biasanya tim itu bertugas untuk menyusun domkumen perencanaan desa dan juga disitu akan dibhas juga anggaran dan sumber dana untuk kegiatan pembangunan dan kadang ketika .“

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibuk Rahmawati Cahyono selaku Sekretaris Desa Beringin Lestari sebagai Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“ Ya, pemerintahan Desa akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan beberapa lembaga pemerintahan desa seperti RT,RW dan tokoh masyarakat untuk membentuk tim pelaksanaan dalam

perencanaan pembangunan tetapi kita juga menunggu sumber dana yang akan digunakan dari pemerintah itu cukup lama juga dek”

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Nurdiana Tamimi selaku Ketua BPD di Desa Beringin Lestari beliau mengatakan:

“memang, dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintahan Desa akan melakukan Musyawarah bersama lembaga desa dan juga tokoh masyarakat”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Misran sebagai ketua LPM di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“saya lihat memang ada, dalam penyusunan pembangunan pemerintahan Desa melakukan Musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat dan juga lembaga Desa lainnya”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugianto sebagai ketua RT di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“kalau saya lihat, Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan memang ada melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat, tetapi dalam musyawarah tersebut memang beberapa masyarakat tidak hadir dan ada juga dari anggota BPD yang tidak ikut serta dalam rapat.”

Tidak sampai di situ peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat saloh sebagai masyarakat :

“Kami selaku masyarakat, juga dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan dengan diadakannya Musrembang disitu kami dapat menyalurkan pendapat kami tentang apa yang kami butuhkan.”

b. Dalam Musrembangdes Untuk Menyusun Rencana Pembangunan

Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 jam 09.00 tentang Bagaimana Pemerintahan Desa dalam MUSREMBANGDes untuk menyusun rencana pembangunan dengan Dedeng Suparrman Kepala Desa Beringin Lestari sebagai key Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

”Dalam MUSREMBANGDes, Pemerintahan Desa mengumpulkan masyarakat untuk memusyawarahkan Rencana Pembangunan dan juga sebelum MUSREMBANGDes ada namanya MUSREMBANGCam yaitu kegiatan yang berasal dari Kecamatan semuanya harus di musyawarahkan bersama masyarakat, dan setiap tahun ada tim dari kecamatan dan harus menjadi prioritas”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibuk Rahmawati Cahyono selaku Sekretaris Desa Beliau mengatakan:

“Pasti ada dilakukannya musrembangdes, Pemerintahan Desa akan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan bertujuan untuk dengan cara menghadirkan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan apa yang diinginkan dan Aspirasi masyarakat dapat tersalurkan.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Nurdiana Tamimi selaku Ketua BPD di

Desa Beringin Lestari beliau mengatakan:

“Ya, didalam Musrembangdes pemerintahan Desa dan juga BPD bersama mengundang masyarakat untuk melakukan penyusunan kegiatan pembangunan agar rencana pembangunan memang benar – benar menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Misran sebagai ketua LPM di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“saya lihat memang, Pemerintahan Desa dalam rencana pembangunan dengan mengadakan MUSREMBANGDes terlebih dahulu dengan mengundang masyarakat dan juga lembaga masyarakat agar pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugianto sebagai ketua RT di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“ Kalau saya lihat memang, pemerintahan Desa ada mengundang masyarakat untuk mengadakan MUSREMBANGDes dengan tujuan untuk memprioritaskan Rencana pembangunan”

Tidak sampai di situ peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat saloh sebagai masyarakat :

“ kalaupun saya melihat ada musrembangdes, memang masyarakat dilibatkan dan di undang untuk menghadiri dalam penyusunan

rencana pembangunan.”

Dari wawancara di atas dapat di analisis bahwa sebelum menyusun rencana pembangunan memnag diadakan musnyawarah rencana pembangunan dan juga Musrembang terlebih dahulu yang melibatkan lembaga pemerintahan Desa seperti RT/RW dan tokoh masyarakat.

Tabel V.5: Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kapubaten Kampar.

No	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Penyusunan Rencana	RPJP tahun 2018
2.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kepala Desa
3.	Peserta Musyawarah	Kepala Desa dan sekdes,LPM, ketua RW/RT
4.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Desa Beringin Lestari
5.	Waktu kegiatan	Kamis, 9 Agustus 2021 jam 09.00 WIB
6.	Yang Di Amati	Jalannya Rapat
7.	Hasil Observasi	Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan pemerintahan desa sudah melakukan musyawarah dengan melibatkan lembaga pemerintahan Desa seperti RW/RT dan tokoh Masyarakat untuk membentuk tim dalam perencanaan pembangunan

Sumber: *data olahan hasil penelitian 2021*

Berdasarkan dari tabel V.IV data wawancara, dokumentasi dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintahan Desa dalam indikator penyusunan rencana pembangunan telah berjalan cukup optimal, dengan mengundang masyarakat untuk musyawarah dalam menyusun rencana pembangunan.

2. Indikator Tahapan Penetapan Rencana Pembangunan

Dalam penetapan Rencana Pembangunan penulis membagikan beberapa indikator dalam menetapkan rencana pembangunan yang dilakukan di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pertanyaan tersebut dapat mengukur keaktifan pemerintahan Desa dan Masyarakat dalam melakukan proses penetapan rencana pembangunan, ketika rencana pembangunan yang telah di tetapkan maka pemerintahan Desa Beringin Lestari berkewajiban melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan bersama tersebut.

a. Pemerintahan Desa Mengadakan Rapat BPD Untuk penetapan Rencana Pembangunan.

Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 jam 09.00 tentang bagaimana Pemerintahan Desa mengadakan rapat dengan BPD untuk penetapan rencana pembangunan, dengan Bapak Dedeng Suparrman Kepala Desa Beringin Lestari sebagai key Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“ Jadi, penetapannya itu antara pemerintahan Desa dengan BPD yaitu seluruh dari hasil musyawarah penetapan yang sudah di putuskan dalam musyawarah itu akan dibentuk seperti peraturan

Desa penetapan rencana pembangunan yang nantinya akan dibahas rancangannya bersama BPD dan akan dituangkan dalam hasil keputusan Desa yang nantinya akan dilaksanakan.”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rahmawati Cahyono selaku Sekretaris Desa Beliau mengatakan:

“Ya, Pemerintahan Desa Dengan BPD akan bermusyawarah membahas tentang penetapan rencana Pembangunan kemudian akan di tetapkan sebagai perdes untuk kegiatan pembangunan dan akan di tuangkan dalam hasil keputusan.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nurdiana Tamimi selaku Ketua BPD di Desa Beringin Lestari beliau mengatakan:

“ ya, memang sebelum menetapkan rencana pembangunan BPD dengan pemerintahan Desa akan di adakannya rapat dengan musyawarah tentang rencana pembangunan dan mana saja pembangunan yang akan di prioritaskan kemudian akan di tetapkan dalam rencana pembangunan”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Misran sebagai ketua LPM di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“ kalau penetapan itu kan, masyarakat dan lembaga tidak di ikut sertakan lagi itu hanya antara pemerintahan Desa dengan BPD saja.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugianto sebagai ketua RT di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“Setahu saya kalau, sudah penetapan rencana pembangunan antara BPD dengan pemerintahan Desa masyarakat sudah tidak di libatkan lagi”

Tidak sampai di situ peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat saloh sebagai masyarakat :

“setau saya, penetapan rencana pembangunan itu sudah antara pemerintahan Desa dengan BPD masyarakat sudah tidak dilibatkan lagi, memang itu sudah tanggung jawab BPD yang akan mengesahkan hasil dari kegiatannya.”

b. Pengambilan keputusan rencana pembangunan antara pemerintahan Desa dengan BPD

Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 jam 09.00 tentang bagaimana proses Pengambilan keputusan rencana pembangunan yang dilakukan dalam rapat antara pemerintahan Desa dengan BPD, dengan Bapak Dedeng Suparrman Kepala Desa Beringin Lestari sebagai key Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“Jadi, hasil pengambilan keputusan rencana pembangunan antara Pemerintahan Desa dengan BPD adalah dengan cara di voting dengan menghasilkan suara terbanyak dari setiap anggota BPD kemudian dari rancangan tersebut BPD mengeluarkan surat

keputusan hasil persetujuan kegiatan dalam rencana pembangunan Desa dan itu nanti akan dilampirkan dalam RKPDes Desa.”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibuk Rahmawati Cahyono selaku Sekretaris Desa Beliau mengatakan:

“itu naanti, akan di adakan voting dengan setiap anggota BPD dengan hasil suara terbanyak nnti BPD yang akan mengeluarkan surat keputusan hasil persetujuan penetapan rencana pembangunan.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Nurdiana Tamimi selaku Ketua BPD di Desa Beringin Lestari belliau mengatakan:

“kalau itu, berdasarkan hasil suara terbanyak dengan cara di voting dari setiap anggota BPD jadi pemerintahan Desa mengajukan rancangan kepada BPD nanti BPD yang akan membahas dari rancangan pembangunan Desa kemudian baru PBD mengeluarkan surat keputusan hasil persetujuan kegiatan dalam pembangunan Desa”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Misran sebagai ketua LPM di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“kalau setahu saya, tentang proses pengambilan keputusan rencana pembangunan antara pemerintahan Desa dengan BPD itu hanya melibatkan BPD saja karena BPD yang menentukannya dengan hasil voting suara terbanyak jadi lembaga masyarakat tidak dilibatkan lagi

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugianto sebagai ketua RT di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“kalau setahu saya, hasil keputusan rencana Pembangunan itu hanya antara BPD dengan pemerintahan Desa dengan cara di voting setiap anggota BPD, hasil suara terbanyak dari beberapa pembangunan”

Tidak sampai di situ peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat salah sebagai masyarakat :

“Setahu saya, memang saat pengambilan keputusan itu akan diadaknya hasil suara terbanyak dengan cara di voting antara sesama anggota BPD.”

Dari hasil wawancara di atas tentang indikator penetapan rencana pembangunan di Desa Beringin Lestari melakukan musyawarah dengan BPD dan hasil dari rapat tersebut akan di bentuk perdes tentang penetapan rencana pembangunan dan hasil dari penetapan tersebut yaitu berdasarkan hasil suara terbanyak dengan cara di voting antar anggota BPD kemudian akan diluarkan surat keputusan hasil persetujuan kegiatan pembangunan Desa.

Tabel V.6: Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

No	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Penetapan Rencana	RPJP tahun 2018
2.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kepala Desa
3.	Peserta Musyawarah	Kepala Desa dan sekdes,LPM, ketua

		RW/RT
4.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Desa Beringin Lestari
5.	Waktu kegiatan	Kamis, 9 Agustus 2021 jam 09.00 WIB
6.	Yang Di Amati	Jalannya Rapat
7.	Hasil Observasi	Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan pemerintahan Desa selalu mengadakan musyawarah dengan BPD, dan hasil dari penetapan rencana pembangunan berdasarkan dengan hasil suara terbanyak dengan cara divoting dari anggota BPD kemudian akan dikeluarkan hasil surat persetujuan kegiatan pembangunan

Sumber: *data olahan hasil penelitian 2021*

Berdasarkan dari tabel V.V data wawancara, dokumentasi dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintahan Desa dalam indikator penetapan rencana pembangunan sudah berjalan optimal karena pembangunan berdasarkan usulan masyarakat dan dari rakyat untuk rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

3. Indikator Tahapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pelaksanaan rencana pembangunan masi

tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring). Sasaran pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Beringin Lestari memang benar – benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

a. Pemerintahan Desa Melaksanakan Pembangunan Sesuai Rencana

Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 jam 09.00 tentang bagaimana Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan sesuai rencana, dengan Bapak Dedeng Suparrman Kepala Desa Beringin Lestari sebagai key Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“Jadi, Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan akan membentuk sebuah tim namanya adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mereka yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang sudah di rencanakan dan juga Pemerintahan Desa akan melakukan penjangkaran aspirasi kepada masyarakat terlebih dahulu agar pelaksanaan pembangunan sesuai rencana, tapi dalam keputusan itu TPK bisa berjalan melaksanakan kegiatan jika anggaran itu sudah di tetapkan dalam APBDes”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rahmawati Cahyono selaku Sekretaris Desa Beliau mengatakan:

“Ya, dalam pelaksanaan rencana pembangunan agar sesuai dengan rencana Pemerintahan Desa terutama mencari informasi masyarakat pembangunan apa yang sedang dibutuhkan masyarakat sehingga

pelaksanaan pembangunan berjalan dengan sesuai rencana artinya Pemerintahan Desa akan melakukan Penjaringan Aspirasi kepada masyarakat.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Nurdiana Tamimi selaku Ketua BPD di Desa Beringin Lestari beliau mengatakan:

“ Jadi, Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Pembangunan sesuai rencana memang adanya melakukan penjaringan aspirasi terhadap masyarakat seperti pembangunan apa yang di butuhkan masyarakat lalu pemerintahan Desa akan membentuk Tim pelaksana kegiatan yang disebut (TPK).”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Misran sebagai ketua LPM di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“Saya lihat memang, pemerintahan desa melakukan penjaringan aspirasi masyarakat mungkin dari situlah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana, tapi kami pun sebagai LPM selalu melakukan penjaringan aspirasi agar pembangunan sesuai rencana.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugianto sebagai ketua RT di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“ Ya, memang pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Desa harus sesuai rencana, kan itu sudah di musyawarahkan sebelumnya, dan juga pasti ada tim yang mengawasi juga kan.”

Tidak sampai di situ peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat saloh sebagai masyarakat :

“Setahu saya, pemerintahan desa agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana pasti ada namanya tim survey kelapngan dan penjangingan terhadap masyarakat tetapi ada juga rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat.”

b. Masyarakat Dilibatkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 jam 09.00 tentang bagaimana .Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, dengan Bapak Dedeng Suparrman Kepala Desa Beringin Lestari sebagai key Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“ Ya jelas, masyarakat itu dalam kegiatan pembangunan sangat dilibatkan karena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan karena tanpa adanya gotong royong dari masyarakat, pelaksanaan pembangunan Desa tidak akan berjalan dengan baik.”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibuk Rahmawati Cahyono selaku Sekretaris Desa Beliau mengatakan:

“Ya, dalam melaksanakan pembangunan dilakukan oleh masyarakat yang bisa melakukannya bila tidak ada masyarakat Desa yang bisa makadicari orang lain yang dapat melakukannya dan Pemerintahan

Desa selalu memantau kerja tukang agar sesuai dengan rencana pembangunan.”

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Nurdiana Tamimi selaku Ketua BPD di Desa Beringin Lestari beliau mengatakan:

“Ya memang, Pemerintahan Desa harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus berotong royong dan ikut berpartisipasi untuk kepentingan bersama agar pembangunan memang benar bermanfaat dan menjadi kebutuhan masyarakat.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Misran sebagai ketua LPM di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“Ya pasti, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Karena manfaat pembangunan inikan akan berdampak kepada masyarakat jadi masyarakat harus mengetahui proses pembangunannya.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugianto sebagai ketua RT di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“Ya, kami selaku ketua RT diberi arahan oleh Desa untuk mengajak kepada masyarakat sekitar untuk melakukan gotong royong”

Tidak sampai di situ peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat saloh sebagai masyarakat :

“Setau saya, memang masyarakat sekitar dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan tetapi tidak mengikuti proses pembangunan sepenuhnya, karena sudah ada tukang yang mengerjakannya.”

Hasil dari wawancara tentang indikator pelaksanaan Rencana Pembangunan agar sesuai dengan rencana dilakukannya penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan bergotong royong bersama masyarakat jika ada masyarakat yang bisa melakukannya maka akan di beri upah sesuai dengan tukang, dan jika tidak ada masyarakat yang bisa melakukannya akan dicari orang lain yang bisa melakukannya dan Pemerintahan Desa selalu memantau pekerjaan tukang agar sesuai rencana pembangunan.

Tabel V.7: Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

No	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Rencana	RPJP tahun 2018
2.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kepala Desa
3.	Peserta Musyawarah	Kepala Desa dan sekdes,LPM, ketua RW/RT
4.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Desa Beringin Lestari
5.	Waktu kegiatan	Kamis, 9 Agustus 2021 jam 09.00 WIB
6.	Yang Di Amati	Jalannya pelaksanaan pembangunan
7.	Hasil Observasi	Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan tentang penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh

	<p>Pemerintahan Desa memang sudah dilakukannya penjangkaran aspirasi masyarakat agar pembangunan sesuai dengan rencana dan dalam pelaksanaan pembangunannya pemerintahan melibatkan masyarakat .</p>
--	--

Sumber: *data olahan hasil penelitian 2021*

Berdasarkan dari tabel V.VI data wawancara, dokumentasi dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintahan Desa dalam indikator pelaksanaan pembangunan sudah berjalan cukup optimal dalam Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

4. Indikator Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan

Setelah pelaksanaan pembangunan selesai, badan perencana masi mempunyai tanggung jawabterakhir, yaitu melakukan Evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan tersebut. Sasaran utama dari kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu pula di evaluasi bilamana kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan semula oleh Pemerintahan Desa Beringin Lestari.

a. Dampak yang di timbulkan dari pelaksanaan pembangunan

Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 jam 09.00 tentang bagaimana Dampak yang di timbulkan dari pelaksanaan pembangunan, dengan Bapak Dedeng Suparrman Kepala Desa Beringin Lestari sebagai key Informan pada Penelitian ini beliau mengatakan:

“ nah, dari pembangunan yang telah kami laksanakan tentu nya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menikmati pembangunan tersebut karena kan sebelum melakukan pembangunan kita kan melihat sisi dari permasalahannya dulu apa yang butuhkan masyarakat, jadi apa yang masyarakat mau kita buat sesuai dengan kepentingan bersama.”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibuk Rahmawati Cahyono selaku Sekretaris Desa Beliau mengatakan:

“jadi, dampak dari pembangunan tersebut sangat bermanfaat kepada masyarakat contoh dari pembangunan drainase sanagat berdampak untuk kelancaran saluran air dek pada saat musim hujan”

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Nurdiana Tamimi selaku Ketua BPD di Desa Beringin Lestari belliau mengatakan:

“yaa kalau menurut saya dampak dari pembangunan ini ya sangat membantu masyarakat karena kan dari prosesnya kami sebagai BPD ikut serta dalam mengawasi pembangunan tersebut.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Misran sebagai ketua LPM di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

”yaa dampak dari pembangunan tersebut kalau kita sebagai LPM melihat dari sisi ekonomi karena dengan adanya pembangunan ini masyarakat ikut serta dalam pengerjaan yang nantinya akan mendapatkan upah pada masyarakat yang memiliki skli tukang.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sugianto sebagai ketua RT di Desa Beringin Lestari Beliau mengatakan:

“ ya menurut saya dampak dari pembangunan ini memang ada sebagaian masyarakat yang kurang puas terhadap pembanguan tersebut Karen kan tidak semua masyarat yang dilibatkan dalam proses pembanguan”

Tidak sampai di situ peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat salah sebagai masyarakat :

“Ya kalau menurut saya sih, dari pembangunan yang telah dilaksanakan memiliki dampak yang cukup baik, tetapi memang belum semuanya terselesaika saya lihat dari pembangunan drainase ada beberapa yang belum selesai pengerjaanya.”

Hasil dari wawancara tentang indikator Evaluasi keberhasilan pembangunan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa bermanfaat bagi

masyarakat, tetapi dari salah satu informan ada yang mengatakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa masi ditemukan pengerjaan yang belum terselesaikan.

Tabel V.8: Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

No	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan	RPJP tahun 2018
2.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kepala Desa
3.	Peserta Musyawarah	Kepala Desa dan sekdes,LPM, ketua RW/RT
4.	Tempat Kegiatan	Aula Kantor Desa Beringin Lestari
5.	Waktu kegiatan	Kamis, 9 Agustus 2021 jam 09.00 WIB
6.	Yang Di Amati	Evaluasi keberhasilan pembanguana
7.	Hasil Observasi	Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan dari damp ak hasil peembangunan memang bermanfaat bagi masyarakat tetapi dari hasil pembangunan tersebut, masi terdapat pembangunan yang pengerjaannya belum terselesaikan seperti pembangunan drainase dan juga semenisasi gang.

Sumber: *data olahan hasil penelitian 2021*

Berdasarkan dari tabel V.VII data wawancara, dokumentasi dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintahan Desa dalam indikator Evaluasi

keberhasilan kurang maksimal, karena masi terdapat masyarakat yang belum tersalurkan aspirasinya dan juga masi sebagian masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil Pembangunan,karena masi terdapat pembngunan yang belum terselesaikan di akibatkan tidak sesuainya RKP dengan hasil pembangunan.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Dalam penelitian ini yang menjadi hambatan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- a. Lamanya sumber dana yang turun sehingga pembangunan sedikit terhambat dan juga ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan yang diharapkan masyarakat tetapi anggran belum cukup dan harus menunggu sampai anggaran terpenuhi baru dilakukannya pembangunan.
- b. Kehadiran peserta rapat yang masi rendah sehingga musyawarah tidak banyak melibatkan masyarakat dan juga anggota BPD saat musyawarah masi terdapat yang tidak hadir.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa yang telah penulis lakukan mengenai Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Penulis dapat mengabil kesimpulan dan memberikan saran sebagai pelengkap akhir dari penyelesaian skripsi ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yag membutuhkan informasi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. penyusunan rencana pembangunan telah berjalan cukup optimal, dengan mengundang masyarakat untuk musyawarah dalam menyusun rencana pembangunan walaupun memang masi beberapa masyarakat dan juga anggota BPD terdapat yang tidak memnghadiri di dalam rapat pentusunan rencana pembangunan.
2. penetapan rencana pembangunan sudah berjalan optimal karena pembangunan berdasarkan usulan masyarakatdan dari rakyat untuk rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
3. pelaksanaan pembangunan sudah berjalan cukup optimal dalam Penyelenggaraan Tahapan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa di

Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

4. Evaluasi keberhasilan kurang maksimal, karena masih terdapat masyarakat yang belum tersalurkan aspirasinya dan juga masih sebagian masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil Pembangunan, karena masih terdapat pembangunan yang belum terselesaikan di akibatkan tidak sesuai RKP dengan hasil pembangunan.

B. Saran

1. Dalam menyusun rencana pembangunan di harapkan kepada Pemerintahan Desa Beringin Lestari, BPD dan masyarakat secara partisipasi tetap mendiskusikan atau mengadakan musyawarah bersama dengan selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
2. Dalam penetapan rencana pembangunan Pemerintahan Desa dan BPD hendaknya selalu mengadakan rapat sebelum penetapan rencana pembangunan dan selalu melibatkan masyarakat agar pembangunan lebih transparan serta mendahulukan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk dibangun.
3. Pelaksanaan pembangunan rencana pembangunan Pemerintahan Desa dan BPD hendaknya meningkatkan peran untuk lebih memperhatikan apa yang sedang dibangun dan memantau langsung pembangunan.
4. Dalam Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan

harus melakukan evaluasi terhadap dampak yang dirasakan terhadap masyarakat dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan, sehingga jika ada kekurangan dari pembangunan tersebut Pemerintahan Desa tidak akan terjadi pada pembangunan-pembangunan selanjutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang dan Azam Wijaya, 2012. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. cetakan 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Atmosudirdjo, S. Praudi. 2002. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, 2003. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Darsono, p. 2005. *Manajemen Keuangan pendekatan praktis kajian pengambilan keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Jakarta : Diadit Media
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas:bdari pemikiran menjadi penerapan*, Depok: FISIP UI Press.
- Juliantara, Dadang. 2004. *Pembaharuan Kabupaten : Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Kartini, Kartono. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori Konsep, dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Marbun, 2007. *Kamus Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Moekijat, 2008. *Koordinasi suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung, Mandar Maju
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung.
- Ndaraha, Talizuduhu, 2001. *keybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta : Renika Cipta.
- Ndaraha, Talizuduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Ketiga, CV. Citra Media, Surabaya*.
- Ndaraha, Talizuduhu, 2011. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pamudji, 2005. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ridwan, 2014. *Tentang Konsep Pemerintahan*. Ban dar Maju : Bandung

- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramdia Pustaka Utama. Jakarta
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2018. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sumardi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Thoha, Miftah 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahun, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmedia
- Widjaja, Haw, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persad.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Telah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cedikia Surabaya

Dokumentasi Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa